

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya, sebab penelitian-penelitian terdahulu dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini antara lain:

Agunggunanto dkk (2016), “tujuan penelitian mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.”²¹

Permasalahan yang dialami BUMDes Kabupaten Jepara adalah keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan

²¹ Edy Yusuf Agunggunanto., Fitrie Arianti., Edi Wibowo Kushartono., dan Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1): 67-81

usaha kurang optimal. Sedangkan BUMDes Panderman yang peneliti teliti memiliki aktifitas-aktifitas unit usaha yang telah berkembang, diantaranya UPK (Unit Pengelolaan Keuangan), Unit Pasar Desa, dan Transit Wisata, Unit Pengelolaan Parkir, Unit Jasa Fotocopy dan ATK, Unit Peternak Sapi, Unit Pengelolaan dan Angkutan Sampah, Unit Pujasera, dan Unit Pengembangan Wisata Paralayang.

Junaidi (2015), “tujuan penelitian mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian survei guna memperoleh data mengenai evaluasi pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah berjalan lancar. Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Meskipun tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan, kendala diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta infrastrukturnya.”²²

Prinsip pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Temurejo menggunakan 6 prinsip diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel; dan masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya. Sedangkan BUMDes Panderman yang peneliti teliti tata kelola BUMDes Panderman dijalankan dengan baik agar dapat membantu

²² MJ Junaidi. 2015. Evaluasi Pelaksanaan (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Al-Iqtishadi*, 2(1): 111-122

meningkatkan perekonomian desa Oro-oro Ombo Kota Batu. Saat ini, BUMDes Panderman menjalankan dua unit usaha, diantara unit *explore* wisata yang menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi pada desa Oro-oro Ombo Kota Batu.

Arianingrum dan Satlita (2017), “tujuan penelitian mengetahui kapasitas BUMDes Tirta Mandiri dalam pengelolaan potensi wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas BUMDes Tirta Mandiri berdasarkan elemen sumber daya manusia belum memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup. Kapasitas BUMDes dalam penyediaan infrastruktur wisata belum memadai sedangkan kapasitas teknologi dan keuangan telah tercukupi. Gaya kepemimpinan di BUMDes Tirta Mandiri yakni *participative management* dan *supportive relationship*. Program dan proses manajemen di BUMDes Tirta Mandiri dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. BUMDes Tirta Mandiri melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam pengelolaan potensi wisata Desa Ponggok.”²³

Dalam pengelolaan potensi wisata, BUMDes Tirta Mandiri melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat dan BNI. Kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata cara kerjasama yang tertuang pada AD/ART BUMDes Tirta Mandiri. Sedangkan BUMDes Panderman yang peneliti teliti, sistem tata kelola cukup berjalan baik namun

²³ Hennidar Pertiwi Arianingrum dan Lena Satlita. 2017. Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, hal 331-340

BUMDes Panderman Oro-oro Ombo Kota Batu masih kurang kerjasama secara penuh dalam pengembangan BUMDes Panderman di desa Oro-oro Ombo.

Ovi Era Tam (2013), “ Tujuan penelitian ingin mengetahui dampak Badan Usaha Milik Desa bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul “, pada penelitian ini menyatakan bahwa BUMDes telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha yang direncanakan.²⁴

Dalam pengelolaan BUMDes tentu harus memberikan kontribusi yang penuh terhadap peningkatan perekonomian desa, di samping itu juga BUMDes menjadi lembaga yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan BUMDes Oro-oro Ombo menjadi salah satu lembaga yang aktif dan berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui unit-unit usaha yang dikembangkan.

Anggraini dan Maria Rosa (2016), “ Menyatakan bahwa masalah yang ditemukan dalam pengelolaan BUMDes terletak pada komunikasi, transparansi, akuntabilitas, kapasitas manajerial dan legal standing. ²⁵Karena beberapa persoalan ini lah yang menjadi prinsip dasar jalannya suatu lembaga, jika terdapat pada prinsip tersebut maka sering terjadi kemunduran dalam tata

²⁴ Ovi Era Tam. 2013. Dampak Badan Usaha Milik Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Universitas Negri Yogyakarta*, hal 4-6

²⁵ Anggraini, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta). Vol 28. No. 2

kelola BUMDes pada umumnya. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus serius untuk di tangani, karena suatu lembaga harus di kelola dengan prinsip-prinsip tersebut.

BUMDes Oro-oro Ombo berusaha untuk fokus terhadap permasalahan pada beberapa prinsip tersebut, hal ini terbukti dengan pengembangan pola komunikasi yang sudah mulai lancar dan dapat di akses dengan mudah, akuntabilitas terhadap unit usaha yang ada, transparansi terhadap mekanisme anggran ataupun program, dan kemandirian pada lembaga BUMDes tanpa adanya kepentingan.

Arrafiqur Rahman (2015),“ Menyatakan bahwa dalam tata kelola BUMDes harus mempertahankan dan fokus terhadap peningkatan perekonomiannya melalui pengembangan hasil dari unit usahanya, dan dalam pengelolaan BUMDes harus berhati-hati terhadap penggunaan dana yang diperoleh, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.²⁶

Pada penelitian di BUMDes Oro-oro Ombo juga fokus terhadap peningkatan ekonomi desa, pengelolaan BUMDes terus dijalankan melalui pengembangan unit-unit usaha yang ada. Tata kelola BUMDes Panderman dijalankan dengan baik agar dapat membantu meningkatkan perekonomian desa Oro-oro Ombo Kota Batu. Saat ini, BUMDes Panderman menjalankan dua unit usaha, diantara unit *explore* wisata yang menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi pada desa Oro-oro Ombo Kota Batu.

²⁶ Arrafiqur Rahman. 2015. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tabih Kecamatan KepenuhanHulu, Kabupaten Rokan Hulu). Vol 2. No. 1

Yasmin Permata Sari (2017), “Dalam perumusan kebijakan pembentukan BUMDes semestinya harus melibatkan ketiga aktor dalam perspektif *governance*, yaitu pemerintah desa dan BPD sebagai *state*, masyarakat desa sebagai *society*, dan perusahaan pengembangan di wilayah desa sebagai *private*.²⁷

Dimana dengan adanya sinergitas ketiga aktor tersebut merupakan indikator keberhasilan perspektif *governance*. Dalam urusan melaksanakan pemerintahan yang baik maka telah menjadi kewenangan yang mendasar untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan. Sehingga *good governance* sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya untuk suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Sinergitas antara pemerintahan desa dan aktor-aktor didalamnya, menjadi acuan penting dalam tata kelola BUMDes yang ideal. Sebenarnya perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa juga harus didasarkan pada asas-asas *good governance*. Karena pada prinsipnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, evektifitas dan efisiensi, dan Orientasi konsensus menjadi prinsip penting dalam penerapan tata kelola BUMDes yang ideal. Dengan prinsip *governance* ini lah basis penyelenggaraan otonomi lokal dan dengan pemerintahan lokal yang kuat tidak akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat apabila tidak ditoopang oleh prinsip-prinsip berikut.

Sementara ini ada beberpa potensi yang saat ini sedang berjalan di BUMDes Panderman, seperti tempatpenyediaan Foto Copy dan ATK, jasa

²⁷ Yasmine Permata Sari. 2017. Analisis Aktor Pembentukan BUMDES Pagedangan Cahaya Madani Dalam Perspektif Governance. Vol 6. No. 1

penunjang wisata dan explore wisata. Unit usaha yang ada menjadi aspek penting dalam pengelolaan BUMDes, karena dengan terpenuhinya prinsip tata kelola yang baik, maka menjadi kunci guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang lebih tertata dan sejahtera melalui usaha bersama BUMDes.

Berdasarkan ketujuh penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan dan tata kelola BUMDes memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa. Seiring dengan adanya Undang-Undang Desa dan otonomi desa maka peranan BUMDes semakin penting keberadaannya sebagai salah satu lembaga ekonomi desa disamping bentuk lembaga ekonomi desa lainnya seperti koperasi, lembaga keuangan mikro (LKM) atau yang lainnya. Analisis manajemen dan tata kelola BUMDes sangat diperlukan untuk mewujudkan manajemen kinerja BUMDes ke depan yang lebih baik.

B. Eksistensi Desa di Era Otonomi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²⁸ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.²⁹ Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah

²⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁹ HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 3

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi serta diperdagunakan untuk dapat mandiri, kuat dan maju serta demokratis guna menciptakan pondasi yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang adil serta makmur menuju pembangunan masyarakat sejahtera. UU No. 23 tahun 2014 menjelaskan “penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang”³⁰

Pemerintah desa adalah simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.³¹ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

UU No. 23 tahun 2014 memberikan gambaran desa dalam menciptakan “*Development Community*” sebagai pijakan yang memposisikan desa bukan lagi sebagai administratif melainkan sebagai “*Independent Community*” dimana msyarakat yang terdapat pada suatu desa diberi hak untuk berbicara

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³¹ Sumber Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 15

untuk kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa secap mutlak meliputi bidang sosial, politik serta ekonomi. Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, termasuk dalam mendirikan dan mengelola BUMDes.

BUMDes dengan badan hukum Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa dibahas dan disepakati serta disepakati oleh kepala desa dan BPD. Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sedangkan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan yang dimiliki oleh desa khususnya berkaitan dengan keuangan.

Keuangan yang dimiliki desa adalah hak serta kewajiban yang melekat pada desa tersebut untuk dapat dipergunakan. BPKP menjelaskan “hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, dimana siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawab dengan masa periode 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.”³² Kholmi menerangkan “alokasi dana desa (ADD) sebagai bantuan stimulan ataupun dana perangsang guna mendorong untuk membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta dan pemberdayaan masyarakat.”³³

Keuangan ADD dalam pengelolaannya adalah bagian yang tak terpisahkan dari APBDes, dimana seluruh kegiatan yang rencanakan serta ditetapkan didanai oleh ADD dan harus dilaksanakan serta dilaukan evaluasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara transparan serta hasilnya dipertanggungjawabkan, baik secara teknis dan hukum maupun administratif. Rosalinda menjelaskan “pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya yang diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007.”³⁴

³² BPKP. 2015. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor: Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan BPKP, hal 33

³³ Masiyah Kholmi. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Ekonomika-Bisnis*, hal 144

³⁴ Okta Rosalinda. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus pada Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan

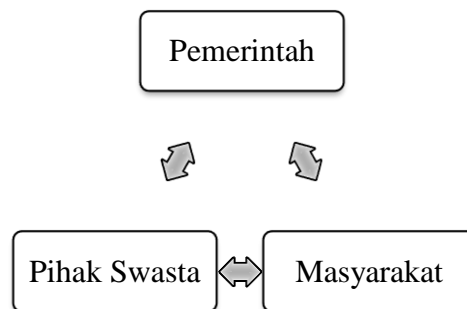
ADD sangat penting bagi pemerintah desa serta membantu program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah desa, selain itu pemerintah desa juga mendapatkan bantuan modal berasal dari *stakeholder* sehingga secara mandiri dan kreatif serta kuat desa dapat melakukan pembangunan. Sedangkan masyarakat tidak selalu menggantungkan harapannya kepada pemerintah disegala aspek kebutuhannya yang pada akhirnya pemerintah hanya fokus pada pengembangan potensi yang terdapat di desa dengan segala kkebutuhan masyarakat tersebut.

C. Tata Kelola BUMDes

Dwiyanto menjelaskan “tata kelola atau *govern* diartikan sebagai mengambil peran yang lebih besar mulai dari proses, aturan serta lembaga yang memungkinkan pengelolaan serta pengendalian masalah-masalah secara kolektif di masyarakat dan secara luas *govern* adalah totalitas semua lembaga serta unsur-unsur yang terdapat ddi masyarakat baik pemerintah maupun non-pemerintah.”³⁵ *Governance* dalam konsepnya dikelola oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan publik, dimana dominasi dari kegiatan tersebut bukan lagi peran pemerintah sehingga dari kegiatan publik tersebut dapat tercipta iklim demokrasi yang baik dalam penyelenggaraannya.

Sumobito Kabupaten Jombang). *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, hal 6-7

³⁵ Agus Dwiyanto. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik (Peduli, Inklusif dan Kolaboratif)*. Yogyakarta: UGM Press, hal 251



Sumber : Rosidi dan Fajriani (2013)

Gambar 2.1 Bagan Aktor *Governance*

Rosidi dan Fajriani menjelaskan “ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah melainkan memerlukan aktor lain karena karena keterbatasan kemampuan pemerintah dan swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Serta tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.”³⁶

D. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.³⁷ Agoes menjelaskan “*Good Corporate Governance* adalah tata kelola yang baik

³⁶ Abidarin Rosidi dan R. Anggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Local Government (Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik)*. Yogyakarta: Andi Offset, hal 10

³⁷ Hery. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung: Alfabeta, hal 11

sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris dan peran direksi serta pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.”³⁸

Good Corporate Governance merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan BUMDes untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMDes akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi BUMDes yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

Good Corporate Governance dalam penerapannya diperlukan komitmen seluruh *stakeholder* yang terlibat didalam organisasi mulai dari perumusan kebijakan, tata tertib sampai dengan kode etik yang harus dipatuhi oleh segenap pihak-pihak yang terlibat dan untuk mewujudkan *Good corporate governance* yang baik dalam pengelolaan BUMDes maka diperlukan audit internal yang berperan serta bertugas meneliti dan mengevaluasi sistem yang ada serta melakukan penilaian terhadap manajemen dalam membuat kebijakan.

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan BUMDes perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola BUMdes yang baik. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *good corporate governance*, yaitu: *transparancy* (penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu

³⁸ Sukrisno Agoes. 2013. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat, hal 101

kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh BUMDes agar dapat dikatakan transparan), *accountability* (kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ BUMDes sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif), *fairness* (perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*), dan *sustainability* (bagaimana BUMDes dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan).³⁹

Penerapan *good corporate governance* di BUMDes memiliki peran yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi BUMDes baik di kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *good corporate governance* akan mendapatkan manfaat yang akan diperoleh, antara lain: meminimalkan *agency cost*, meminimalkan *cost of capital*, meningkatkan nilai saham BUMDes, dan mengangkat nilai BUMDes. *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam BUMDes sangat memberikan pengaruh dan manfaat yang dirasakan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta dapat mendukung tumbuh kembangnya BUMDes untuk menghadapi persaingan global. BUMDes yang dikelola dengan baik serta benar dapat meningkatkan citra positif bagi investor dan dapat meningkatkan kinerja BUMDes serta menciptakan nilai tambah (*value added*) ditengah-tengah persaingan usaha yang kompetitif.

Good Corporate Governance dalam penerapannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMDes melalui laporan-laporan keuangan maupun non keuangan sehingga kinerja BUMDes dapat diukur dengan menciptakan

³⁹ Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 11-13

proses pengambilan keputusan yang transparan serta baik, dan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* laporan keuangan mutlak diperlukan sebagai elemen terpenting dalam menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas yang didalamnya mencakup segala kewajiban BUMDes untuk dapat menyajikan dan melaporkan serta mengungkapkan apa yang dilakukan oleh BUMDes dalam kegiatan operasionalnya khususnya pada aspek administrasi keuangan yang wajib disajikan secara transparan serta diperlihatkan kepada pihak-pihak terkait. *Good Corporate Governance* menekankan pentingnya *stakeholder* serta pihak terkait ataupun berkepentingan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan BUMDes dengan benar, akurat dan tepat waktu serta BUMDes ditekankan untuk menjalankan kewajibannya untuk menjelaskan dan membuka atau mengungkapkan secara detail, akurat serta transparan tentang keseluruhan dari kinerja BUMDes.

E. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDES menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. BUMDes sebagai lembaga yang bergerak dibidang ekonomi khususnya dipedesaan haruslah memiliki suatu perbedaan dengan lembaga-lembaga dibidang ekonomi umumnya. Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih ataupun kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa agar tidak timbul kapitalisasi yang berdampak pada terganggunya nilai-nilai kehidupan dimasyarakat.

BUMDes merupakan lembaga dibidang ekonomi yang modal usahanya dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat serta menganut asas mandiri, hal tersebut menunjukkan pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak swasta melalui pihak ketiga sesuai dengan pasal 213 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004. Penjelasan didalam UU tersebut penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes karena implikasinya akan bersentuhan dengan Peraturan Daerah serta Peraturan Desa.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes didasarkan pada enam prinsip yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparasi, akuntabel serta sustainable sebagai bentuk perwujudan pengelolaan ekonomi desa produktif. BUMDes dalam upaya mencapai tujuannya maka diperlukan suatu sistem yang pengelolaannya dapat berjalan efektif dan efisien serta profesional sehingga kemandirian yang dicapai BUMDes dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa diberbagai aspek mulai dari pelayanan dan pendistribusian barang serta

jasa sehingga hasilnya dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai penanggungjawabnya.

BUMDes dalam implementasinya tidak diperbolehkan memberatkan masyarakat dalam mencari pemenuhan kebutuhannya, hal tersebut dikarenakan BUMDes adalah usaha milik desa yang signifikan dapat menggerakkan perekonomian desa. Selain itu, BUMDes sebagai lembaga desa diharuskan memberikan layanan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat serta anggotanya, maksudnya dalam menjalankan BUMDes terdapat mekanisme ataupun aturan yang telah disepakati bersama-sama sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dipedesaan.

BUMDes pendiriannya diatur oleh perundang-undangan yaitu: 1) Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU No. 6 tahun 2014. 2) Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP No. 43 tahun 2014. 3) Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip umum pengelolaan BUMDes terdiri dari: 1) Pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. 2) BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri. 3) BUMDes didirikan

dengan tujuan yang jelas. 4) Pengelolaan BUMDes melibatkan pihak ketiga. 5) Pelayanan umum BUMDes diperuntukkan bagi masyarakat desa dengan karakteristik (a) masyarakat yang belum dapat mencukupi sandang, pangan dan papan, (b) masyarakat berpenghasilan rendah, (c) masyarakat yang belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan (d) masyarakat yang cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang menekan harga.⁴⁰

Pendirian BUMDes secara umum dimaksudkan untuk 1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usaha masyarakat di desa; 2) memperdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran serta peningkatan pendapatan asli desa; dan 3) meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonominya.

Permodalan BUMDes diperoleh dari kekayaan desa yang peruntukkannya dipisahkan sebesar 51% sedangkan sisanya diperoleh dari penyertaan modal pihak lain. Permodalan berasal dari desa didapat melalui pemerintah (kabupaten/ kota dan provinsi) berbentuk dana segar sebagai bantuan. Sedangkan dalam pelaksanaannya BUMDes dapat bekerjasama dengan pihak-pihak swasta ataupun masyarakat dan BUMDes.

Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan sebagai berikut: 1) BUMDES *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro yang hadir paling awal sebelum lahirnya BUMDes. 2) BUMDES *Serving* yaitu BUMDes yang bergerak dalam bidang pengelolaan serta pelayanan air bersih

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hal 11-12

dibawah naungan PAMDes. 3) BUMDes *Brokering* atau *Renting* yaitu BUMDes yang melayani pembayaran listrik serta pasar yang terdapat di desa. 4) BUMDes *Trading* adalah BUMDes yang bergerak dibidang penyediaan kebutuhan pokok serta sarana produksi pertanian.⁴¹

F. Peningkatan Perekonomian Desa

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Perekonomian masyarakat desa adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peningkatan ekonomi masyarakat desa merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat di desa dalam

⁴¹ Anom Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, hal 32

kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Sudharma menjelaskan “hal utama terpenting dalam upaya penguatan ekonomi desa yaitu memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan ataupun menjalin keeratan disemua lapisan masyarakat desa sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran serta dapat membuka akses pasar.”⁴² Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 dan peraturan Kemendagri No. 39 tahun 2010 mengatur secara spesifik keuangan BUMDes yang didalamnya mencakup sumber permodalan berasal dari pemerintah (desa, kabupaten/ kota dan provinsi), tabungan masyarakat, pinjaman dan berasal dari pihak-pihak lain berupa penyyertaan modal serta bagi hasil atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

⁴² Kadek Januarsa Adi Sudharma. 2016. BUMDes (Suatu Teladan untuk Mengembangkan Ekonomi Kreatif Desa). *Jurnal Hukum*, hal 11